

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak bagi suatu negara memiliki fungsi atau peranan penting yaitu fungsi anggaran, pengatur, dan redistribusi atau pemerataan pendapatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara bahwa pendapatan negara terdiri dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Setiap tahunnya target penerimaan pajak belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dibuktikan pada realisasi *tax ratio* tahun 2017 yang mencakup penerimaan perpajakan dan sumber daya alam, hanya mencapai 10,7% di bawah target sebesar 11,5% sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2017 (www.cnbcindonesia.com). Pemerintah telah melakukan berbagai cara guna meningkatkan pendapatan negara dari segi pajak namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari pajak.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE – 16/PJ/2017 yang mengatur mekanisme permintaan informasi atau bukti keterangan terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Surat Edaran itu diharapkan memberikan kepastian terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam dokumen SE yang diterima Bisnis, edaran itu akan menjadi pedoman permintaan informasi atau bukti keterangan dari lembaga jasa keuangan (kalimantan.bisnis.com).

Adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dengan perusahaan akan menimbulkan tindakan secara legal atau ilegal dalam mengurangi pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya yakni penghindaran pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sebagai kewajiban yang akan mengurangi jumlah keuntungan yang akan didapat oleh suatu perusahaan sedangkan kebijakan pajak bagi pemerintah merupakan pendapatan negara atau sumber dana yang berfungsi

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa & Kurniasih, 2012). *Tax avoidance* yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Dewi & Jati, 2014).

Teori agensi mengungkapkan terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Teori agensi menyatakan adanya asimetri antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) dimana manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Hal tersebut berdampak pada tindakan menyimpang yang

dapat dilakukan oleh pihak agen dalam mengelola perusahaan yang sedang dijalankan. Tindakan tersebut dapat berindikasi seperti adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak agen guna meminimalkan biaya pajak agar perusahaan yang memperoleh tingkat keuntungan atau memiliki tingkat utang yang tinggi mampu mengurangi beban pajaknya. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak agen dapat menjadi konflik dengan pihak prinsipal apabila tidak diketahui (Atmaja, 2008).

Penghindaran pajak dapat terjadi akibat adanya praktik tata kelola perusahaan yang kurang baik sehingga menimbulkan aktivitas *tax avoidance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Annisa (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* diproksikan dengan indeks *corporate governance* yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). *Leverage*

menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. *Leverage* dihitung dengan total utang dibagi dengan total modal perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Putu (2017) menyatakan bahwa *corporate governance* yang diukur menggunakan indikator kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) menghasilkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan I Made (2015) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance* dan komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Adapun pengujian terhadap variabel *leverage* yang dilakukan oleh peneliti Praditasari dan & Putu (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif apabila diukur menggunakan indikator kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, komisaris independen dan hasil pada variabel *leverage* yang tidak stabil dari beberapa penelitian terdahulu maka peneliti ingin meneliti kembali pengaruh adanya *corporate governance* dengan menggunakan indikator yang berbeda yaitu *corporate*

governance indeks dan meneliti kembali rasio *leverage* dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di BEI)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah *corporate governance* dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di BEI?

C. TUJUAN PENELITIAN

Rumusan masalah dalam penelitian di atas memiliki tujuan yaitu:

- Untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di BEI.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan melengkapi temuan-temuan empiris di bidang akuntansi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak terkait adanya *tax avoidance*. Salah satunya adalah manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak internal lainnya di perusahaan tentang adanya tindakan penghindaran pajak.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian mampu memberikan gambaran terhadap faktor yang mempengaruhi dilakukannya tindakan penghindaran pajak dan dampak yang dapat diterima investor dari penghindaran pajak tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang dampak atau akibat yang didapat oleh pemerintah dari adanya tindakan dari penghindaran pajak tersebut.

